



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
: BIROKRASI

**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DIAH NATALISA
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
3. NHK : 71816

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 7.210.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 591 m2/528 m2 di KAB / KOTA OGAN ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/36 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 407 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 494 m2/490 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.585.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 313 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/316 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000.000
7. Tanah Seluas 151 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
8. Tanah Seluas 134 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 250.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD ALPHARD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 1.126.803.185**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.109.960.172
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	10.696.763.357
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.696.763.357

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.